

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ambya. 2023. *Ekonomi Keuangan Daerah*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Djaenuri, M. Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kadar Pamuji, dan Abdul Aziz Nasihuddin. 2020. *Hukum Pajak*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Khalimi, dan M. Iqbal. 2020. *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Mohammad Taufik. 2018. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Noor, Muhammad. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Sleman: INTERPENA Yogyakarta.

Nur, Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Sihombing, Sotarduga, dan Susy Alestriani Sibagariang. 2020. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

JURNAL

Aily, Muntuan.P. (2016). Analisis Official Assesment System (Penentuan Besarnya Pajak Terhutang) PBB di Kelurahan Kendis Tondano Timur. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi 4, No. 2*.

Anggono, Bayu Dwi. (2018). Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya. *Masalah Hukum 47, no. 1*.

Ariffin, Melissa, dan Tunjung Herning Sitabuana. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia. *Serina IV Untar, no. 28*.

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1*.

Febrianto, Yohanes, dan Tumpal J. R. Sitinjak. (2017). Peran Kepuasan Konsumen dalam Memediasi Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Minat Beli Konsumen untuk Menggunakan Jasa Maskapai Penerbangan Air Asia. *Business Management Journal 13, no. 1*.

- Mahmuzar. (2020), Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2.
- Malahati, Fildza, Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Qathrunnada, dan Shaleh. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2.
- Manggiasih, Rahajeng Ayuningtyas. (2024). Diskresi Pemerintah Daerah dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *UNES Law Review* 6, no. 3.
- Mawarni, Cut Maya Lukfa, Razif, M.Haykal, dan Rany Gesta Putri Rais. (2024). Analisis Efektifitas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)* 2, no. 3.
- Mega Christia, Adissya, dan Budi Ispriyarso. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform* 15, no. 1.
- Nasir, Muhammad Safar. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1.

- Pristy, Kirana Lalita. (2022). Implementasi Pengelolaan Pajak Daerah berdasarkan UU HKPD dan Optimalisasi Penerimaan Daerah. *Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- Rioni, Yunita Sari, dan Teuku Radhifan Syauqi. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan 1, no. 2*.
- Roziqin, Syahrizal, dan Regina Theresia Koyansow. (2024). Sistem Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal de Facto 10, no. 2*.
- Septiliani, Lia, dan Ismet Ismatullah. (2021). Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi 6, no. 1*.
- Siregar, Winda Suciani, dan Nuri Aslami. (2022). Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di UPT. Balai Yasa Pulubrayan PT. KAI (Persero). *Jurnal Program Mahasiswa Kreatif, Vol. 6, no. 1*.
- Sofyan Hadi, dan Tomy M. Saragih. (2013). Ontologi Desentralisasi Fiskal dalam Negara Kesatuan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan XVIII, no. 3*.
- Suhada, dan Andri Eko Putra. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa terhadap Kepuasan Pelanggan pada CV. Nur Ihsan Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika Vol. 13, no. 2*.
- Suhardja, Henry. (2023). Peran Pemerintah terhadap Kepatuhan dan Kesadaran

Masyarakat sebagai Subjek Pajak Penghasilan. *Jurnal Lex Specialis Vol. 4, no. 1.*

Sulistiyawan, Aditya Yuli. (2022). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.*

Suriadi, Hari, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, dan Lara Yandri. (2024). Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Menara Ilmu Vol. 18, no. 1.*

Tumanduk, Leonardo Riedel, Inggriani Elim, dan Victorina Z. Tirayoh. (2021). Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Parkir dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Pajak Daerah di BPPRD di Kota Bitung. *Jurnal EMBA Vol. 9, no. 2.*

Zulkenedi, Zulkenedi, Aldri Frinaldi, dan Lince Magriasti. (2023). Desentralisasi Administratif untuk Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Syntax Literate;; Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 8, no. 6.*

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

SUMBER LAIN

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang 2024". Diakses melalui <https://l1nq.com/UeDR8> pada 14 Februari 2025.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. "Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2024." Diakses melalui <https://l1nq.com/HNLOS> pada 14 Februari 2024.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. "Statistik Demografi dan Sosial: Kependudukan dan Migrasi." Diakses melalui <https://shorturl.at/cJc8e> pada 15 Januari 2025.

Bapenda Semarang. "Sistem Monitoring Pajak Online." Diakses melalui <https://l1nq.com/XDuIk> pada 16 Februari 2025.

Bapenda Semarang. "Informasi Pendapatan Pajak Daerah Terkini." Diakses melalui <https://realtime.bapenda.semarangkota.go.id> pada 28 Oktober 2024.

Fariq, Anisyah Al. "Sri Mulyani Kupas Tuntas Alasan Lahirnya UU HKPD." Liputan6.com. Diakses melalui <https://encr.pw/3DP2u> pada 15 Januari 2025.

Jeven. "Poin Penting dalam UU HKPD." Pajakku, 2021. Diakses pada 15 Januari 2025.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. "Sistem Perpajakan." Diakses melalui <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan> pada 17 Februari 2025.

Pemerintah Kota Semarang. “Pemkot Semarang Tetapkan APBD 2024 sebesar Rp.5,46 Triliun, Mbak Ita: Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat.” Diakses melalui <https://shorturl.at/DE42I> pada 26 Oktober 2024.

Pemerintah Kota Semarang “Visi dan Misi.” Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Diakses melalui <https://shorturl.at/AVQhL> pada 14 Februari 2025.

PPID Kota Semarang. “Profil Kota Semarang.” Diakses melalui <https://shorturl.at/mhyvM> pada 14 Februari 2025

Sulaiman. “Membangun Ulang Hasil Perubahan Kedua Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” JDIH Bangka Belitung, 2022.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undp.ac.id Pos-el: fh[at]live.undp.ac.id

Nomor : 1269/UN7.F1/AK/XI/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

29 NOV 2024

Yth. Kepala Kantor Bapenda Kota Semarang
Jalan Pemuda No. 148, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50132

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Firsty Fathya Adhyaksa
NIM : 11000121120150
Alamat : Jalan Galang Sewu Raya No. 30, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, 50275
nomor HP : 081364637425
bidang minat : Hukum Administrasi Negara
judul skripsi : Implementasi Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

11191993032002



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pemuda No. 148 Tel (024) 3513366, 3515871 Saluran 1250, Faks (024) 3548920 Semarang 50132

SURAT – KETERANGAN

Nomor : B/5498/070/XII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : KURNIA BEKTI RAHAYU, S.Kom
N I P : 19810613 200901 2 005
J a b a t a n : Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Menerangkan bahwa

NAMA	NIM	JURUSAN/FAKULTAS
FIRSTY FATHYA ADHYAKSA	11000121120150	S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Telah Melaksanakan RISET pada BAPENDA Kota Semarang pada tanggal
09 Desember 2024 - 19 Desember 2024.

20 Desember 2024
a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Semarang
Sekretaris
u.b.
Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian



Kurnia Bekti Rahayu, S.Kom
Penata Tingkat I/III-d
NIP 198106132009012005

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Kepala Prodi S1 Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
2. Mahasiswa ybs.

